



"Kupon Putih" Jadi Sorotan Dewan

Amlapura (Bali Post) -

Istilah "kupon putih" mulai ramai jadi bahan pembicaraan warga. Isu itu mencuat ketika rapat kerja gabungan komisi di DPRD Karangasem dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), belum lama ini. Kupon putih yang dikelola oknum pengusaha galian ini menjadi kontroversial. Pasalnya, seolah-olah mendapat keistimewaan. Bahkan sejumlah anggota dewan mendesak Pemkab Karangasem bersama Tim Yustisi agar segera melakukan penertiban.

Salah satu desakan datang dari anggota DPRD Nengah Sudarsa. Sebagai mantan birokrat, dia mengaku malu kalau sampai praktik seperti ini dibiarkan. Dia berbagi pengalaman, sewaktu dirinya masih menjadi Kepala Dinas Pendapatan Daerah (dulu Dispenda, kini BPKAD) hingga menjadi Sekda Karangasem, tidak pernah dibiarkan terjadi praktik-praktik di luar sistem pemerintah daerah seperti ini. Sehingga kala itu pendapatan dari sektor galian C benar-benar menopang pendapatan asli daerah Karangasem.

Dia memberikan arahan agar Tim Yustisi dan Pemkab Karangasem bergerak mengambil langkah-langkah

sistematis. Dia meminta pemerintah daerah jangan sampai tunduk dengan preman. Arahan serupa juga datang dari anggota DPRD Karangasem lainnya. Agar praktik seperti ini tidak semakin meluas di kalangan pengusaha galian C.

"Praktik-praktik seperti ini yang membuat pengelolaan sumber daya alam kita seperti galian C menjadi tidak maksimal. Tertibkan saja. Kenapa takut? Tim Yustisi mesti turun, tidak usah takut sama preman," tegas politisi Partai Golkar ini.

Salah satu pengusaha galian yang berizin, Wayan Parka, saat ditemui juga mengaku keberatan adanya

praktik seperti itu. Bahkan, dia memegang bukti kupon putih itu digawangi tiga orang pengusaha. Sejak awal dia sudah mempermasalahkan kupon putih itu, sebelum dibahas di lembaga dewan. Dia mempertanyakan, kenapa pemegang kupon putih ini seolah-olah diistimewakan. Dengan menunjukkan kupon putih ini, maka setiap truk yang lewat di portal tidak dikenakan pajak. Demikian juga lokasi galiannya di sekitar Banjar Dinas Bukit Paon, Kecamatan Bebandem. "Ini salah satu bentuk kebocoran, sejak awal sudah saya keluhkan, tetapi tak ada respons," sorot Wayan Parka.

Kepala Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nengah Mindra dikonfirmasi, Minggu (29/7) kemarin, belum berkenan memberi keterangan. Dihubungi melalui *handphone*-nya, dia tak memberi jawaban. Kenapa pemegang kupon putih ini terkesan diistimewakan pun, belum terjawab. Demikian juga bagaimana pajak yang diterapkan bagi yang menerbitkan kartu putih ini. Sejauh mana pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap munculnya kupon putih ini, belum jelas tindak lanjutnya.

Sekda Karangasem I Gede

Adnya Muliyadi mengaku akan berkoordinasi dengan Pemprov Bali. Sebab, sejak berlakunya aturan baru, pengelolaan galian C juga menjadi kewenangan provinsi. Bahkan, dia mengajak lembaga dewan bersama-sama menghadap ke Pemprov Bali untuk mengungkapkan apa yang jadi permasalahan di lokasi galian C itu. Hal serupa juga disampaikan Kepala Satpol PP Karangasem Wage Saputra. Pihaknya mengaku siap turun bersama Pemprov Bali melakukan penertiban. (kmb31)

"Praktik-praktik seperti ini yang membuat pengelolaan sumber daya alam kita seperti galian C menjadi tidak maksimal. Tertibkan saja. Kenapa takut? Tim Yustisi mesti turun, tidak usah takut sama preman."

**Nengah Sudarsa
Anggota DPRD**

Edisi : Senin, 30 Juli 2018

Hal : 11